KAJIAN AKADEMIK

Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Haluan Pembangunan Nasional

BADAN PENGKAJIAN MPR RI

TAHUN 2018

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN AKADEMIK

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI BEKELANJUTAN DAN SOSIAL BUDAYA DALAM NASKAH HALUAN NEGARA SEBAGAI RUJUKAN HALUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BADAN PENGKAJIAN MPR RI
2018

KAJIAN AKADEMIK

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI BEKELANJUTAN DAN SOSIAL BUDAYA DALAM NASKAH HALUAN NEGARA SEBAGAI RUJUKAN HALUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Cetakan Pertama, November 2018

PENASEHAT
PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI
Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

PENGARAH
Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

WAKIL PENGARAH
Dra. Selfi Zaini

PENANGGUNG JAWAB
Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR
Tommy Andana, Siti Aminah,
Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno

TIM PENYUSUN
Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, dan Badan Pengkajian MPR

ISBN
978-602-5676-30-7

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI

Sambutan

Kepala Biro Pengkajian

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhannahu Waa Ta'alaa*, Tuhan Yang Maha Esa. Buku Kajian Akademik hasil kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dapat diterbitkan.

Hasil Kajian memuat tentang Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan. Kajian ini menitikberatkan pada aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai rujukan pembangunan ekonomi Indonesia dalam rancangan naskah pokok-pokok haluan negara. Kajian dilakukan dengan melakukan tahap-tahap operasionalisasi kegiatan seperti membuat kerangka teori dan metodologi penelitian, studi referensi, diskusi terbatas, wawancara dengan pakar, dan tahap penulisan.

Penerbitan buku hasil kajian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pemikiran bagi pembaca yang ingin memahami sistem pembangunan ekonomi Indonesia dan bahan rujukan anggota MPR dalam melakukan pengkajian komprehensif. Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendorong dan penyemangat untuk terus melakukan kajian ilmiah dan kritis guna membuka cakrawala pemikiran dan memberikan ide pembenahan terhadap sistem pembangunan ekonomi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf bila terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku kajian akademik ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat.

Kepala Biro Pengkajian MPR,

ttd

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Sambutan

Sekretaris Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Kewenangan MPR Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya dasar apabila akan dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut, selaras dengan tugas MPR sebagaimana terdapat pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu antara lain adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia tentu diperlukan berbagai data dan informasi komprehensif kajian yang berasal dari berbagai pihak.

MPR melalui alat kelengkapannya yakni Badan Pengkajian MPR dipandang perlu untuk melakukan kegiatan kajian akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Salah satu lembaga penelitian yang ditunjuk yakni Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tema yang dikaji sesuai dengan rekomendasi Keputusan No 4/MPR/2014 yakni Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan.

Pembangunan Ekonomi merupakan jantung bagi setiap negara dalan menjalankan roda pemerintahannya. Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah suatu sistem pembangunan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam

bereligius, menjungjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur dan kecintaan, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila mendudukan rakyat sebagai pemangku dan sekaligus pemilik kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan sebagai konsekuensi atas mandat yang sudah diberikan dan diamanahkan melalui pemilu sebagai instrumen politik.

Di zaman dengan model pemilihan langsung dan pelaksanaan pemilihan calon pemimpin secara serentak, Demokrasi Pancasila memiliki tantangan yang cukup berat dibidang kesinambungan dan arah pembangunan negara, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dan kebijakan ekonomi. Melihat tantangan yang kompleks tersebut, kajian ini disusun secara sistematis dan menarik dengan membagi kedalam tiga topik penelitian yakni Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Konsepsi Haluan Negara, Aktualisasi Pancasila Dalam Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, dan Aktualisasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi.

Akhir kata, semoga melalui hasil kajian tentang "Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan" ini dapat memberikan pencerahan dan semangat untuk terus berpikir kritis, serta dapat menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

Sambutan

Pimpinan Badan Pengkajian

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Para pendiri bangsa dengan selamat sentausa telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan adalah awal tahapan menuju kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia dijiwai dan diintergrasikan dengan nilai-nilai luhur bangsa indonesia sebagaimana telah diejawantahkan dalam sila-sila Pancasila. Hal ini berarti bahwa penyusunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia merupakan perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Perekonomian Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi semua warga negara yaitu sejahtera lahir dan batin yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing; haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan; haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Percepatan bidang pembangunan ekonomi berkelanjutan dan sosial budaya tersebut yang dikaji secara komprehensif oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya, menarik untuk diketahui oleh pembaca. Perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila yang dirancang melalui perdebatan mendalam oleh para pendiri bangsa memiliki baragam dimensi.

Dengan hasil kajian tentang "Percepatan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Sosial Budaya dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan" akan menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta mampu menjadi

pendorong untuk berperan aktif memberikan masukan dalam rangka pembenahan Perekonomian Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada tim peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah menyusun kajian ini dan seluruh pihak yang terkait. Semoga buku ini memberikan manfaat.

wassalamu alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2018

PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI

Ketua,

Ttd.

Dr. BAMBANG SADONO, S.H.,M.H.

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd.	Ttd.
Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	**RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM**
Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
Ttd.	Ttd.
MARTIN HUTABARAT, S.H.	**Ir. TIFATUL SEMBIRING**

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Biro Pengkajian Sekretaris Jenderal MPR i

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR..... iii

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR v

DAFTAR ISI vii

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI BERKELANJUTAN DAN SOSIAL BUDAYA DALAM NASKAH HALUAN NEGARA SEBAGAI RUJUKAN HALUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1

BIDANG EKONOMI 1

1. Kondisi Umum Perekonomian Nasional 1
   - 1.1 Struktur Perekonimian 1
   - 1.2 Pertumbuhan Ekonomi 3
   - 1.3 Pemerataan Pendapatan 5
   - 1.4 Pengentasan Kemiskinan 7
   - 1.5 Pemerataan Pembangunan Daerah 9
2. Kondisi Umum, Peluang dan Tantangan Bidang Ekonomi 11
   - 2.1 Kondisi Umum 11
     - a. Infrastruktur dan Energi 11
     - b. Investasi 15
     - c. Industri Pengolahan 16
     - d. Ekonomi Kreatif 17
     - e. Pariwisata 18
     - f. Maritim dan Kelautan 19
     - g. Pangan 21
     - h. Perdagangan 23
     - i. Lingkungan 25
   - 2.2 Peluang 30
     - a. Infrastruktur dan Energi 30
     - b. Investasi 31
     - c. Industri Pengolahan 32
     - d. Ekonomi Kreatif 32
     - e. Pariwisata 33
     - f. Maritim dan Kelautan 33
     - g. Pangan 34
     - h. Perdagangan 35
     - i. Lingkungan 35

2.3 Tantangan 37
a. Infrastruktur dan Energi 37
b. Investasi 38
c. Industri Pengolahan 38
d. Ekonomi Kreatif 39
e. Pariwisata 40
f. Maritim dan Kelautan 40
g. Pangan 41
h. Perdagangan 42
i. Lingkungan 42
2.4 Arah Kebijakan 44
a. Infrastruktur dan Energi 44
b. Investasi 46
c. Industri Pengolahan 46
d. Ekonomi Kreatif 47
e. Pariwisata 48
f. Maritim dan Kelautan 49
g. Pangan 50
h. Perdagangan 51
i. Lingkungan 52

LAMPIRAN 57

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI BERKELANJUTAN DAN SOSIAL BUDAYA DALAM NASKAH HALUAN NEGARA SEBAGAI RUJUKAN HALUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. BIDANG EKONOMI

1. Kondisi Umum Perekonomian Nasional

1.1 Struktur perekonomian

Pada 2017 Indonesia menduduki peringkat ke-16, negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. Namun, terdapat sejumlah catatan penting tentang struktur perekonomian yang dimiliki Indonesia. Pada periode 2012-2016, lapangan usaha primer memiliki kontribusi 21-25% dari PDB, dimana sektor pertanian-perikanan-kehutanan menyumbang sekitar 13% dari PDB total. Sedangkan kontribusi industri pengolahan berkisar antara 20-21%. Dengan demikian lapangan usaha jasa-jasa memiliki sumbangan terbesar yaitu antara 54% hingga 59% dari PDB. Bila kita cermati komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada 2017, terlihat bahwa sektor pertanian menampung pekerja yang terbesar yaitu sekitar 30% dari seluruh orang yang bekerja. Sektor industri memiliki pangsa sekitar 14%, sehingga sekitar 56% penduduk yang bekerja berada di sektor jasa-jasa, dimana sektor perdagangan memiliki kontribusi sekitar 40% dari seluruh pekerja sektor jasa-jasa. Keberadaan sektor pertanian menjadi krusial karena meskipun kontribusinya terhadap PDB relatif kecil, kemampuannya untuk menyediakan

lapangan pekerjaan adalah 2 kali kemampuan sektor industri pengolahan.

Di sisi lain, jika kita lihat kondisi perdagangan internasional pada 2016, terlihat bahwa industri pengolahan mendominasi ekspor, dengan kontribusi sekitar 61% dari total ekspor. Lapangan usaha primer menyumbang sekitar 25% ekspor nasional. Sedangkan ekspor jasa-jasa hanyalah sekitar 14% dari ekspor total. Struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor jasa-jasa (dengan sub sektor perdagangan dan sub sektor konstruksi mengambil pangsa terbesar), namun belum berorientasi ekspor. Pada 2016, tiga komoditas ekspor Indonesia yang paling menonjol adalah batubara (sektor pertambangan), minyak kelapa sawit mentah (sektor industri pengolahan) dan tekstil serta produk tesktil (sektor industri pengolahan).

Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam tersebar di belasan ribu pulau serta sumber daya manusia yang berlimpah yang siap dikembangkan sesuai dengan struktur perekonomian yang diinginkan. Sistem politik desentralisasi memungkinkan tiap-tiap daerah mengidentifikasi produk-produk unggulan sesuai dengan struktur ekonomi yang diinginkan. Relatif rendahnya produktivitas sektor pertanian merupakan tantangan terbesar dalam struktur perekonomian kita. Begitu pula dengan belum menonjolnya keberadaan komoditas industri manufaktur berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sektor jasa yang dimiliki Indonesia cenderung masih berorientasi ke pasar

domestik. Dengan demikian, harus dilakukan koordinasi perencaan lintas bidang serta lintas daerah agar Indonesia dapat dengan tepat menentukan struktur perekonomian yang diinginkan berikut pilihan komoditas penunjangnya.

1.2 Pertumbuhan ekonomi

Pada tahun 2016, pendapatan perkapita Indonesia mencapai 47,96 juta atau mencapai USD3.605. Pendapatan perkapita Indonesia saat ini masih dalam kategori “lower middle income”. Capaian saat ini lebih cepat dari prediksi bank dunia bahwa Indonesia akan mencapai USD3.000 pada tahun 2020.

Pertumbuhan saat ini lebih rendah dari prediksi RPJMN 2014-2019 yang optimis pada tingkat rata-rata pertumbuhan 7%. Sampai tahun 2017, tingkat rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 4,99%. Penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017 adalah industri pengolahan, khususnya sub sektor industri makanan dan minuman. Walaupun bila dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terus menurun dari tahun 2015 sampai 2017, yaitu dari 21,54% menjadi 21,22%. Di sisi lain, sektor pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 0,47% per tahun dan sama seperti industri pengolahan, mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB Indonesia. Komponen pembentukan PDB Indonesia tahun 2017 ditopang oleh tingkat konsumsi sebesar 54,3%. Sedangkan peran pemerintah hanya 8,4% dan investasi 32,6%.

Dengan data diatas, maka perlu percepatan pertumbuhan ekonomi, dengan mengurai “bottle neck” ekonomi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Indonesia dapat mencapai 4 negara dengan PDB terbesar di dunia, namun dengan memperbaiki hambatan-hambatan terutama dalam upaya meningkatkan efesiensi dan produktifitas yang ditunjukkan oleh Total Factor Productivity (TFP). Dari sisi penawaran, pemerintah mempercepat peningkatan infrastruktur, mendorong sektor industri pengolahan sebagai basis perekonomian dan sebagai penyeimbangan sektor-sektor primer dan sektor-sektor tersier. Transisi ekonomi berjalan dengan baik bila basis sektor sekunder seperti industri pengolahan diperkuat terlebih dahulu. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi ekonomi dapat mendorong produktifitas dan efesiensi, namun perlu dipertimbangkan juga dampak destruktifnya terhadap sektor-sektor tradisional. Dari sisi permintaan, perlu mendorong tingkat konsumsi masyarakat dengan menggunakan hasil produksi dalam negeri. Sumber-sumber potensi investasi dalam negeri dan luar negeri dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekspor diharapkan berperan besar dalam perekonomian ke depan, dengan cara meningkatkan daya saing produk ekspor pertanian, manufaktur dan jasa. Produk yang berdaya saing harus didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas, barang modal yang berkualitas dan pemanfaatan teknologi. Impor barang dan jasa lebih diarahkan untuk menghasilkan produk-

produk barang eskpor yang berdaya saing tinggi, sedangkan impor produk akhir dapat ditekan dan digantikan dengan produk dalam negeri yang sama kualitasnya.

Perekonomian Indonesia harus mempunyai kemampuan untuk bertahan jika faktor-faktor eksternal mengalami gonjangan, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, harga komoditas melonjak, daya saing produk yang menurun akibat dari persaingan dengan produk sejenis dari pesaing. Karena itu, peranan UMKM menjadi penting dalam menopang ekonomi nasional ke depan.

1.3 Pemerataan pendapatan

Tolok ukur internasional untuk ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa angka Indeks Gini Indonesia pada September 2016, adalah 0,394 yang menunjukkan kondisi “ketimpangan rendah.” Di kawasan perkotaan, angka yang dicapai adalah 0,409 yang berarti telah memasuki kondisi “ketimpangan menengah” sedangkan di kawasan perdesaan dicatat angka 0,316 (“ketimpangan rendah”). Perlu dicatat bahwa pada 2016, kawasan perkotaan merupakan tempat tinggal sekitar 52% penduduk Indonesia. Di sisi lain, pada 2016 , 20% penduduk terkaya di perkotaan menguasai sekitar 47% pendapatan, sedangkan 40% penduduk termiskin hanya menguasai 16% dari total pendapatan. Kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah perdesaan adalah lebih baik dimana 20% penduduk terkaya

menguasai sekitar 40% pendapatan dan 40% penduduk termiskin memperoleh 21% dari pendapatan total.

Sementara itu, di sektor bisnis pada 2016 terdapat 56.5 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang memperoleh 59% dari PDB. Sedangkan perusahaan besar hanya berjumlah sekitar 8.000 unit, namun mampu menguasai 41% PDB. Padahal 97,3% pekerja di sektor bisnis berada di usaha mikro, kecil dan menengah. Namun usaha besar mampu mengakses 81% kredit yang diberikan oleh perbankan. Kehadiran puluhan juta usaha mikro, kecil dan menengah yang notabene adalah bentuk penciptaan lapangan kerja merupakan peluang bagi pemerataan pendapatan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaporkan bahwa pada 2017, hampir 4 juta unit usaha kecil dan menengah telah mampu melakukan transaksi melalui internet, yang berarti semakin membuka peluang untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Dengan melakukan kegiatan usaha sendiri, masyarakat dapat memperoleh pendapatan dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Apalagi sejarah mencatat bahwa saat terjadi krisis ekonomi 1997/98, usaha mikro, kecil dan menengah lebih mampu bertahan ketimbang usaha besar.

Tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha menengah ke bawah, adalah keterbatasan akses terhadap modal, keterampilan, teknologi dan juga pasar bagi produk barang dan jasa yang mereka

hasilkan. Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan yang semakin membuka seluas-luasnya akses bagi para wirausahawan tingkat mikro, kecil dan menengah. Kolaborasi antara pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) dengan kalangan swasta dalam mengembangkan dunia bisnis merupakan cara yang paling efektif untuk dapat meningkat pemerataan pendapatan.

1.4 Pengentasan kemiskinan

Pembangunan nasional di era reformasi, hingga kini belum berhasil mencapai target persentase penduduk miskin yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada 2009 dipatok target penduduk miskin sebanyak 8.2% dari seluruh penduduk Indonesia, namun pencapaian pada tahun tersebut cukup jauh dari target yaitu sekitar 14%. Pada 2014 ditargetkan terdapat 8-10% penduduk miskin, sedangkan pencapaian untuk tahun tersebut adalah sekitar 11%. Pada 2019 ditetapkan target 7-8% penduduk miskin, sedangkan pencapaian hingga September 2017 masih berada pada angka 10.12% yang mengindikasikan sulit tercapainya target penduduk miskin 2019.

Indonesia telah memiliki banyak pengalaman dalam penerapan berbagai program pengentasan kemiskinan, dari pemberian uang tunai hingga pembinaan kewirausahaan. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang paling sederhana yaitu pemberian uang tunai melalui skema Bantuan Langsung Tunai

(BLT) pada 2005 kini telah diperbaiki menjadi Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pemberian uang tunai secara bersyarat dengan disertai pendampingan bagi keluarga-keluarga miskin agar dapat lebih memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak mereka.

Dari sekitar 26 juta penduduk miskin pada 2017, sekitar 11 juta diantaranya berada di Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan infrastruktur terbaik dibanding pulau-pulau lainnya. Hal ini menunjukkan terbukanya peluang penciptaan lapangan pekerjaan yang cukup luas. Sekitar 16 juta penduduk miskin berada di perdesaan yang berarti amat dekat dengan sektor pertanian. Saat ini kita menghadapi tantangan kondisi sektor pertanian-perikanan-kehutanan dengan produktivitas yang relatif rendah. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus semakin disesuaikan dengan kondisi di daerah-daerah. Idealnya bagi penduduk miskin dibuka kesempatan untuk menjadi bagian dari proses produksi komoditas manufaktur dan jasa yang berbasis bahan baku serta sumber daya yang terdapat di daerah-daerah, terutama kawasan perdesaan. Dengan demikian, peran pemerintah di daerah-daerah menjadi sangat krusial. Merekalah yang dapat secara lebih tepat menemukan cara membantu penduduk miskin. Kehadiran Dana Desa yang pada 2017 dianggarkan hingga Rp60 triliun dapat diarahkan untuk turut membantu mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Kekhasan Dana Desa ini adalah terbukanya kesempatan bagi penduduk desa untuk

menentukan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

1.5 Pemerataan Pembangunan Daerah

Perekonomian Indonesia masih terpusat di beberapa daerah tertentu, khususnya di pulau Jawa. Hingga tahun 2016 lalu, enam provinsi di Pulau Jawa (termasuk Madura) menyumbang 58,49% dari PDB nasional dan 56,6% penduduk Indonesia juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi ini menyebabkan lingkaran yang tak berujung (vicious circle) ketimpangan pembangunan antar daerah. Jumlah penduduk yang besar mencerminkan kebutuhan pembangunan yang besar sekaligus jumlah vote yang tinggi, yang dapat mempengaruhi perhatian pemerintah pusat dalam merencanakan dan mengalokasikan dana pembangunan.

Sebagai akibatnya, selama ini pembangunan terfokus pada Pulau Jawa dan kesenjangan dengan wilayah lain terus terjadi. Di Pulau Jawa, terdapat akses jalan sepanjang sekitar 0,7 km untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, sekitar dua kali lipat akses jalan di Sumatera, Nusa Tenggara dan Sulawesi, dan nyaris sepuluh kali lipat akses jalan di Kalimantan, Maluku dan Papua. Dari seluruh ruas tol, 93% berada di Pulau Jawa. Akses terhadap telekomunikasi, pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas di Pulau Jawa juga lebih tinggi dibanding wilayah lain. Sebagai akibatnya, Pulau Jawa menjadi

tujuan yang semakin menarik untuk kegiatan usaha, investasi, mencari pekerjaan dan menempuh pendidikan. Ketimpangan pembangunan ini pada gilirannya akan mendorong perpindahan penduduk menuju Pulau Jawa, yang kemudian kembali mendorong kebutuhan pembangunan yang lebih tinggi di Pulau Jawa, dan demikian seterusnya vicious circle terjadi.

Ketimpangan pembangunan perekonomian antar daerah juga terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Per 2017 lalu, sekitar 47% penduduk Indonesia tinggal di perdesaan tetapi 62,24% dari total 27,76 juta jumlah penduduk miskin berada di wilayah perdesaan. Pada 2016, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan di daerah perkotaan mencapai Rp520.631,00 di perkotaan dan Rp397.100,00 di perdesaan. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan di perkotaan mencapai Rp647.500,00, dua kali lipat di perdesaan yang hanya Rp314.166,00. Demikian pula halnya akses terhadap telekomunikasi, layanan Pendidikan dan kesehatan di pedesaan tertinggal jauh dari perkotaan. Kesenjangan ini dapat memicu perpindahan penduduk (urbanisasi), kegiatan ekonomi dan investasi dari desa ke kota. Dalam kondisi ini penetrasi layanan perbankan di pedesaan justru dapat memperbesar kesenjangan jika menjadi sarana mobilisasi dana tabungan masyarakat pedesaan menjadi kredit untuk kegiatan usaha di perkotaan yang secara ekonomi lebih menjanjikan.

Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan Jawa-luar Jawa dan pedesaan-perkotaan, diperlukan arah kebijakan yang memiliki wawasan kewilayahan dan keberanian untuk melakukan pembangunan bukan dari demand-side yang didasarkan kebutuhan penduduk saat ini, tetapi dari supply-side yang menitikberatkan pada pembangunan kemampuan potensi dan daya saing produksi nasional dalam jangka menengah-panjang. Untuk itu, penyediaan sarana dan prasarana dalam rumpun air (terutama irigasi dan bendungan), rumpun energi (listrik dan bahan bakar) dan rumpun transportasi (akses jalan dan pelabuhan) yang merata menjadi kunci untuk mendukung kegiatan ekonomi di luar Jawa dan di wilayah perdesaan meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha skala mikro, kecil dan menengah. Selain itu, sinkronisasi dan penyederhanaan perijinan usaha di tingkat pusat-daerah juga mutlak diperlukan untuk mengundang investasi ke daerah yang belum berkembang tetapi memiliki potensi ekonomi.

2. Kondisi Umum, Peluang dan Tantangan Bidang Ekonomi

2.1 Kondisi Umum

a. Infrastruktur dan Energi

Berdasarkan Executive Opinion Survey dalam World Economic Forum 2017, tidak mencukupinya infrastruktur menempati peringkat keempat dari 16 faktor yang paling menghambat dalam melaksanakan bisnis di Indonesia. Berada di atas ketidakcukupan

infrastruktur adalah “korupsi”, “birokrasi pemerintahan yang tidak efisien” serta “akses terhadap keuangan”.

Pembangunan waduk berperan penting dalam mendukung kedaulatan pangan melalui jaringan irigasi serta mendukung kedaulatan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA. Hingga akhir 2014 terdapat 1.332 waduk, dengan kapasitas tampung 12,61 milyar kubik, dan pada periode 2014-2017 sedang berjalan pembangunan 33 waduk dari total 49 waduk baru yang ditargetkan hingga 2019. Salah satu yang sedang akan segera selesai adalah Bendungan Karian di Provinsi Banten yang merupakan bendungan ketiga terbesar di Indonesia dan akan menjadi salah satu sumber utama air baku untuk produksi air minum di Provinsi Banten dan DKI Jakarta sekaligus menjadi sumber PLTA. Sementara itu pada 2016 tercatat bahwa sumber air minum yang paling banyak diandalkan oleh rakyat Indonesia adalah air dalam kemasan (31,30%) yang pengelolaannya banyak dilakukan oleh swasta namun menghadapi kendala belum jelasnya aturan main akibat pembatalan UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi pada 2015.

Pada 2016 total panjang jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah berturut-turut 47.017 km, 55.416 km dan 423.980 km. Sekitar 21% dari total panjang jalan di Indonesia pada 2016 berada di Pulau Jawa. DKI Jakarta pada 2016 memiliki 7.094 km jalan dan sejumlah provinsi memiliki panjang jalan yang lebih pendek atau tidak jauh berbeda dari DKI Jakarta,

misalnya D.I.Yogyakarta (3.874 km), Banten (6.976 km), Bali (7.879 km), Kalimantan Utara (5.016 km), Gorontalo (5.885 km), Sulawesi Barat (6.809 km) dan Maluku Utara (7.006 km).

Salah satu indikator penting dalam isu pembangunan perumahan adalah backlog yaitu kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan rumah yang dibutuhkan masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa angka backlog perumahan pada 2016 adalah 11,56 juta unit atau sekitar 17,42% dari jumlah rumah tangga. Provinsi dengan backlog terbesar adalah DKI Jakarta (49,84%) disusul oleh Sumatera Utara (30.05%).

Pembangunan bandara perintis sebagai salah salah satu infrastruktur vital yang dapat untuk menjangkau daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh mode transportasi lain terus dilakukan di sejumlah daerah, antara lain: di Kabupaten Bengkulu Selatan (lapangan terbang Pandang Panjang), Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Mesuji (Provinsi Lampung), serta di Provinsi Kalimantan Utara.

Di bidang energi, saat ini negeri kita menghadapi masalah serius karena cadangan sumber energi yang kian menipis. Pada akhir 2017, tingkat produksi minyak bumi berada di sekitar tingkat 790.000 barel per hari, tidak jauh berbeda dibanding angka 2014. Peran sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi terhadap PDB terus menurun. Sub sektor pertambangan minyak, gas dan panas bumi mengalami penurunan

nilai tambah dari sekitar Rp323,6 triliun (harga konstan 2010) pada 2013 menjadi Rp315,5 triliun pada 2016. Sementara itu pada 2017, kebutuhan BBM Indonesia meningkat menjadi sekitar 1,6 juta bpd sedangkan produksi BBM dalam negeri hanyalah sekitar 885.000 bpd sehingga masih dibutuhkan banyak impor BBM. Sementara itu pada 2017 lifting gas bumi Indonesia adalah 1,944 juta boepd yaitu sedikit di bawah target dalam APBN yaitu 1,965 juta boepd. Produksi gas bumi Indonesia sebagian besar berasal dari 3 provinsi yaitu Nanggroe Atjeh Darussalam (NAD), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Papua dan sekitar 40% dari produksi ini diekspor. Produksi batubara pada 2017 mencapai 461 juta ton dan hampir 80% nya diekspor. Batubara menjadi salah satu dari lima komoditas utama ekspor Indonesia. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) pada 2014 mencapai 1,69 juta kilo liter dan pada 2017 meningkat menjadi 3,23 juta kilo liter.

Pada 2017, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional adalah sekitar 60.000MW sedangkan rasio elektrifikasi nasional adalah sebesar 92,80% dan hanya dua provinsi dengan rasio elektrifikasi di bawah 70% yaitu NTT (59,17%) dan Papua (48,74%). Menurut Nota Keuangan 2018, subsidi listrik mengalami penurunan dari Rp100 triliun pada 2013 menjadi Rp63,1 triliun pada 2016 dan pada 2017 dialokasikan Rp45,4 triliun. Secara total alokasi subsidi pada 2017 adalah sekitar Rp169 triliun dimana alokasi subsidi energi adalah sekitar Rp90 triliun.

b. Investasi

Investasi untuk periode 2012-2016, berperan 33% hingga 35% dari total PDB. Sedangkan pertumbuhan investasi pada periode tersebut secara rata-rata hanyalah sekitar 4,7% per tahun yang berarti di bawah rata-rata pertumbuhan PDB nasional yaitu sekitar 5,1%. Realisasi PMA pada 2017 mencapai Rp431 triliun sedangkan PMDN bernilai Rp262 triliun sehingga total keduanya adalah Rp693 triliun yang berarti melampaui target dalam RPJMN yaitu Rp678,8 triliun. Pulau Jawa masih menjadi lokasi utama bagi kegiatan investasi. Pada 2017, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi-provinsi yang paling banyak menerima PMA serta PMDN.

Kinerja bidang investasi diukur menggunakan berbagai macam indikator. Salah satu laporan yang paling banyak menjadi acuan adalah survei Ease of Doing Business yang didesain oleh Bank Dunia. Menurut laporan survei ini, pada 2017 Indonesia menduduki peringkat ke 72 (dari 190 negara) dalam hal kemudahan berbisnis. Hal-hal yang menduduki peringkat relatif baik adalah “mendapatkan sambungan listrik”,”menyelesaikan masalah kebangkrutan”, “perlindungan bagi investor minoritas” dan “memperoleh kredit” yang berturut-turut menduduki peringkat 38, 38, 43 dan 55. Sedangkan hal-hal yang peringkatnya kurang menggembirakan antara lain: “pembayaran pajak” “memulai suatu usaha”, “menjalankan kontrak”, yang masing-masing menduduki peringkat 114, 144 dan 145.

c. Industri pengolahan

Kontribusi industri pengolahan Nonmigas terhadap PDB Indonesia terus mengalami penurunan, pada 2016 hanya tinggal sekitar 20%. Beberapa sektor manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil telah mengalami deindustrialisasi. Kebanyakan industri pengolahan berorientasi pada pasar domestik.

Industri pengolahan berorientasi ekspor yang berkembang adalah pengolahan hasil pertanian dan perkebunan diantaranya minyak sawit, karet mentah dan makanan-minuman. Kesemua industri tersebut memiliki basis produksi bahan baku yang kuat di dalam negeri tetapi tidak memiliki jaringan rantai nilai global maupun regional (ASEAN). Sebagai akibatnya, peningkatan nilai tambah dari produk-produknya sulit dilakukan.

Dari sisi teknologi, industri pengolahan yang berkembang di Indonesia masih bersifat padat karya. Hal ini disebabkan karena: 1) proses liberalisasi perdagangan tanpa arah kebijakan yang kuat mendorong terjadinya spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif dimana Indonesia memiliki keunggulan komaratif pada upah tenaga kerja yang murah; 2) pada era 1970-2000 investor asing mengembangkan industri di Indonesia, untuk jenis jenis industri yang sudah tidak memiliki keunggulan komparatif di negara-negara asalnya, terutama negara pemimpin teknologi di Asia seperti Jepang dan Korea, karena biaya tenaga kerja yang mahal.

d. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Adapun industri kreatif didefinisikan sebagai “Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut“ (Bekraf, 2008).

Ekonomi kreatif tumbuh menjadi kegiatan ekonomi yang penting di seluruh dunia, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, serta meningkatnya jenis selera dan kebutuhan konsumen. Di Indonesia ekonomi kreatif bertumbuh 4,38% di 2015, 4,98% pada 2016 dan diperkirakan tumbuh semakin pesat di masa mendatang. Kontribusi terhadap PDB Nasional juga mengalami peningkatan dari 7,38% di 2015 menjadi 7,44% di 2016.

Di Indonesia, kegiatan ekonomi kreatif diklasifikasikan ke dalam 16 subsektor, yaitu aplikasi dan pengembang permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Ekonomi kreatif dapat menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia yang sejauh ini masih banyak

bertumpu pada sektor sumber daya. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat melengkapi sektor industri pengolahan yang perkembangannya mengalami stagnasi. Di masa depan akan semakin banyak kegiatan ekonomi baik yang diperuntukkan bagi pasar domestik maupun pasar ekspor yang berbasis daya nalar, kreativitas, dan inovasi.

Produk ekonomi kreatif Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan nilai ekspornya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tiga produk utama ekonomi kreatif yaitu fashion, kriya dan kuliner menunjukkan nilai ekspor yang meningkat dalam kurun 2010-2015.

Kegiatan ekonomi kreatif memiliki kelebihan dalam hal penciptaan kesempatan kerja, yaitu kemampuannya menyediakan kesempatan kerja bagi individu dan usaha kecil. Hal ini disebabkan tidak diperlukannya skala usaha yang besar dalam beberapa jenis produksi kreatif. Pada tahun 2015 lalu ekonomi kreatif telah mampu menyediakan kesempatan kerja bagi hampir 16 juta orang dan terdepat kecenderungan yang makin meningkat dari tahun ke tahun.

e. Pariwisata

Terjadi perkembangan jumlah dan pertumbuhan wisatawan mancanegara. Pada 2014 jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 9 juta orang dan pada 2019 Kementerian Pariwisata menargetkan kenaikan menjadi 20 juta orang. Adapun jumlah

kunjungan wisatawan nusantara yang pada 2014 berjumlah 250 juta pergerakan ditargetkan meningkat menjadi 275 juta pergerakan pada 2019. Pada periode yang sama, peringkat daya saing pariwisata dunia Indonesia ditargetkan meningkat dari 70 menjadi 30.

Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara tersebut diharapkan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia secara makro. Kementerian Pariwisata menargetkan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional meningkat dari 4% di 2014 menjadi 8% di tahun 2019. Pada periode yang sama devisa yang tercipta ditargetkan meningkat dari Rp. 120 triliun menjadi Rp. 240. Penyerapan tenaga kerja juga diharapkan meningkat dari 11 juta menjadi mencapai 13 juta.

f. Maritim dan Kelautan

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut terluas, jumlah pulau terbanyak dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penyumbang penting dalam PDB nasional (menurut harga konstan 2010) dimana terjadi peningkatan berarti nilai tambah di sektor ini yaitu dari Rp164,3 triliun pada 2013 menjadi Rp214,5 triliun pada 2016. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan produk perikanan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir. Pada periode 2013-2016, sektor perikanan rata-rata bertumbuh 6.9% per tahun, jauh lebih tinggi dari angkat pertumbuhan

PDB nasional untuk periode tersebut, yaitu 5.1%. Pada 2017, produksi perikanan tangkap mencapai 7,6 juta ton atau setara dengan Rp158 triliun. Sedangkan produksi perikanan budidaya pada 2017 adalah 16,1 juta ton. Pada 2017 dicapai angka ekspor sekitar US$4,1 miliar, yang merupakan suatu peningkatan dari angka 2016 yaitu US$3,78 miliar.

Nilai tukar nelayan (NTN) rata-rata pada 2017 mencapai 109,86 dan nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) rata-rata pada tahun tersebut adalah 99,09. Nilai tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan. Pada awal tahun 2016, sebanyak 29 provinsi memiliki nilai tukar nelayan di atas 100 yang berarti mereka mengalami peningkatan kesejahteraan. Terdapat 4 provinsi yang perlu mendapat perhatian karena kondisi kesejahteraan nelayan yang cenderung menurun yaitu: Provinsi Nanggroe Atjeh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sementara itu di bidang budi daya ikan, pada awal 2016, terdapat 23 provinsi yang memiliki nilai tukar pembudi daya ikan yang berada di bawah 100 atau cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk di dalam kedua provinsi ini adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali yang adalah berada di kawasan dengan fasilitas infrastruktur serta tingkat perekonomian yang relatif baik dibanding provinsi-provinsi lainnya.

Sementara itu, sub sektor angkutan laut pada

periode 2012-2016 rata-rata per tahun hanya berperan sekitar 8% dari seluruh nilai tambah di Sektor Transportasi dan Pergudangan. Rata-rata pertumbuhan di sub sektor angkutan laut untuk periode tersebut adalah sekitar 4.5%, sedangkan Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh hingga sekitar 7.2%. Di bidang perhubungan laut, tercatat bahwa pada 2015 tercatat terdapat 296 juta ton barang yang dibongkar dan 294 juta ton barang yang dimuat ke kapal antar pulau, sedangkan bongkar-muat untuk pelayaran luar negeri angkanya berturut-turut 98 juta ton dan 340 juta ton.

Dalam kegiatan bongkar-muat barang antar pulau dan juga pelayaran luar negeri, pelabuhan-pelabuhan laut yang menonjol perannya terdapat di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pelabuhan laut di Kalimantan Selatan mencatat bongkar-muat terbesar untuk pelayaran antar pulau, sedangkan untuk pelayaran luar negeri, bongkar-muat terbesar terjadi di pelabuhan laut di Kalimantan Timur.

g. Pangan

Masih masifnya peralihan fungsi (konversi) lahan produktif/lahan basah menjadi lahan kering menjadi penghalang terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta peningkatan produksi pertanian (pangan, holtikultura, perkebunan dan

peternakan). Regulasi saat ini terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak memberikan efek terhadap kegiatan alih fungsi lahan. Selain itu, kurangnya komitmen Kepala Daerah dan Satuan Perangkat Daerah yang terkait dan penilaian aspek keuntungan jangka pendek beralihnya lahan menjadikan sulitnya menahan laju peralihan fungsi lahan. Luas lahan kepemilikan petani semakin mengecil dan terjadinya degradasi lahan akan menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Disamping, semakin sulitnya pembiayaan karena sulitnya akses terhadap sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani.

Sektor pertanian terus tumbuh, namun lebih lambat dari pertumbuhan nasional semua sektor dan kontribusi pun terus menurun dan di lain pihak, sektor pertanian dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan cadangan pangan nasional. Kegiatan importasi pangan kebutuhan pokok masih berlangsung, walaupun dibarengi dengan besarnya jumlah ekspor hasil pertanian. Dengan menurunnya net ekspor di sektor pertanian, berdampak pada turunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu, dalam rangka peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam rangka mendukung kedaulatan pangan perlu pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari

kecukupan gizinya dalam bentuk energi dan protein, tetapi juga dinilai dari keberagaman ketersediaan gizi tersebut berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). Untuk kelompok bahan pangan hewani dan sayuran dan buah tidak tercapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) maksimal. Selain itu, angka rawan pangan sudah banyak mengalami penurunan. Tingginya harga pangan di dalam negeri menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun. Data menunjukkan dibeberapa daerah koefisien variasi dari harga pangan berfluktuatif.

Sebagai penyangga kebutuhan protein, peternakan menghadapi meningkatnya permintaan kebutuhan hasil ternak tapi dihadapkan dengan kekurangan hasil ternak, terutama pengembangan bibit ternak. Agar tumbuh industri peternakan, perlu pelibatan masyarakat peternak dan swasta dengan memberikan insentif.

h. Perdagangan

Dalam kurun waktu 2001-2017, nilai ekspor barang Indonesia berfluktuasi tajam dari tahun ke tahun. Nilai ekspor jasa masih sangat kecil, di bawah 25 miliar USD per tahun, kurang dari 20% dari nilai ekspor barang.

Sebelum 1987, ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas Migas. Komposisi ini berubah pada 1987, dimana kontribusi ekspor Nonmigas sudah melampaui Migas. Sejak 1987, kontribusi eskpor Nonmigas semakin meningkat dan

jauh melampui Migas. Pada tahun 2017, kontribusi ekspor Nonmigas telah melebihi 90% dari total nilai ekspor barang.

Meskipun demikian, eskpor Nonmigas Indonesia masih belum sepenuhnya disumbangkan oleh industri pengolahan. Pada 2017 komoditas ekspor Nonmigas ke-dua terpenting adalah batubara dan ke-enam terpenting adalah bijih dan konsentrat tembaga. Komoditas industri pengolahan yang memiliki kontribusi cukup penting hanyalah pengolahan hasil perkebunan minyak sawit dan karet dalam bentuk olahan dasar.

Dilihat dari negara tujuan ekspor, pada tahun 2017 lima tujuan ekspor utama Indonesia secara berturut-turut adalah Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura. Nilai ekspor ke lima negara tersebut mencapai 50,3% dari total ekspor. Hal ini menandakan bahwa ekspor Indonesia masih terkonsentrasi dan belum dapat lepas dari ketergantungan terhadap beberapa negara tujuan tertentu.

Lebih dari 50% ekspor Indonesia disumbangkan oleh lima provinsi utama di tiga pulau besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten di Pulau Jawa, Kalimantan Timur (Pulau Kalimantan) dan Riau (Pulau Sumatera). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi untuk komoditas yang berdaya saing internasional masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu.

i. Lingkungan

Anugrah Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah seharusya dapat di kelola/dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sumber daya alam dilindungi untuk dijaga kelestarian keanekaragamannya secara alami dan berkelanjutan, baik di darat maupun di lautan. Lingkungan hidup yang berada di dalamnya harus dijaga agar tidak terjadi degradasi lingkungan, kerusakan lingkungan akibat eksternalitas kegiatan pertambangan dan kegiatan pembangunan nasional.

Sumber daya alam tak terbarukan, khusus untuk mineral, melalui kebijakan nasional mewajibkan untuk setiap produksi mineral harus dilakukan pengolahan dan pemurnian sebelum di ekspor. Kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan investasi hilirisasi usaha penambangan mineral di dalam negeri sehingga nilai tambah yang tercipta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Relaksasi kebijakan peningkatan nilai tambah barang mineral berbatas waktu diberikan untuk memberikan ruang investasi dengan melibatkan stakeholder dalam negeri.

Percepatan pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Hal ini karena saat ini Indonesia masih menjadi negara net importir BBM, sehingga perlu ada bahan bakar alternatif lainnya yang dapat

digunakan. Sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik diwajibkan untuk mensubstitusi bahan bakar fosil dengan BBN pada persentase tertentu dan dilakukan secara bertahap. Namun sampai saat ini, bioetanol belum dapat berkembang secepat biodiesel, mengingat keterbatasan sumber bahan baku serta harga yang dinilai masih belum ekonomis.

Pengembangan bioenergi listrik adalah bagian dari kebijakan bauran energi, untuk mengurangi ketergantungan energi dari fosil. Sampai saat ini, porsi pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomassa, Biogas, dan Sampah Kota kapasitas terpasang masih belum berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki padahal kebijakan ini menjadikan solusi bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk ditarik jaringan listrik PLN dan belum mendapat akses listrik PLN.

Sumber daya terbaharukan, seperti hutan, mengalami eksploitasi berlebihan sehingga menggangu sustainability pasokan hasil-hasil hutan dan menyebabkan degradasi lingkungan. Laju deforestasi hutan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan/konversi kawasan hutan menjadi pemukiman, perindustrian, dan pertambangan serta makin maraknya illegal logging. Berkurangnya luas hutan dapat mengurangi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya termasuk jasa-jasa lingkungan lainnya. Selain itu, memburuknya kondisi hutan mempengaruhi persediaan air bagi kehidupan manusia, baik air tanah maupun air permukaan.

Ancaman kebakaran hutan yang pernah melanda Indonesia saat ini sudah dapat diatasi walaupun masih perlu upaya lebih keras. Untuk memenuhi asas pemerataan, maka kawasan hutan dapat dikelola oleh masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan. Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antarwilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.

Daerah sulit air bersih pada umumnya termasuk daerah tertinggal yang sangat memerlukan bantuan penyediaan sarana air bersih. Air tanah telah terbukti memiliki nilai strategis sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari masyarakat. Bahkan tahun 2014 Unicef dan WHO memperkirakan, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara yang hampir dua pertiga dari populasi tidak mempunyai akses ke sumber air minum. Kegiatan eksplorasi sumur bor baru dimulai tahun 2005 hingga sekarang dan baru mencapai sebanyak 1.611 sumur bor. Sedangkan permohonan bantuan sumur bor di daerah sulit air hingga saat tahun 2015 mencapai 7.500 pemohon.

Sejak era otonomi daerah, terjadi degradasi lingkungan yang cukup masif akibat kegiatan ekonomi.

Degradasi lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capain dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menurut sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 sebesar 65,50, tahun 2012 sebesar 64,21, dan tahun 2013 sebesar 63,1. Menurut Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2017, angka IKLH pada tahun 2015 sebesar 68,23, tahun 2016 sebesar 65,73 dan tahun 2017 sebesar 66,19. Dari 2 informasi data ini menunjukkan trend menurun darii tahun 2011 sampai tahun 2013. Dan trend menurun berlanjut dari tahun 2015 ke tahun 2016. Namun menarik, pada tahun 2017 terjadi peningkatan IKLH. Walaupun terlihat bahwa indeks kualitas air terus menurun, sedangkan indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan membaik. Bila dilihat berdasarkan wiilayah, cukup menarik bahwa ternyata degradasi lingkungan terus terjadi di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali yang notabene adalah penggerak pertumbuhan nasional.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Dari data menunjukkan kasus yang telah ditangani oleh penegak hukum bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meningkat dari tahun 2015 hanya 8 kasus, 2016 12 kasus dan menjadi 24 kasus yang tertangani pada tahun 2017.

Pencemaran udara dapat dilihat dari kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO2, SO2 dan CO2 yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah particulate matter(PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Saat ini dibeberapa kota di Indonesia, sudah terpasang alat pemantau pencemaran udara. Sampah atau limbah bukan hanya dari domestik/rumah tangga, tapi limbah yang dihasilkan industri juga harus perhatian. Pemerintah sudah melakukan upaya dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 dengan memberikan fasilitasi akses publik terhadap Aplikasi Siraja Limbah Online dan konsultasi terkait pengelolaan limbah secara umum. polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran pesisir dan laut. Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) khususnya Working Group 1 Physical Science Basis, telah merilis laporan Fifth Assesment

Report (AR-5) dalam bentuk Summary for Policy Maker, bahwa diperkirakan pada akhir 2100, temperatur global akan lebih hangat 1.8 - 4°C, dibandingkan dengan rata rata temperatur pada rentang 1980-1999. Rata-rata temperatur global akan meningkat lebih dari 2°C diatas temperatur global sebelum periode industri, pada tahun 2100. Laju kenaikan muka air laut pada abad 21 diperkirakan akan melampaui laju kenaikan pada periode observasi 1971-2010 pada seluruh skenario AR-5. Risiko bencana banjir selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau semakin meningkat.

Selain ancaman kerusakan lingkungan, terdapat ancaman berkurangnya keanekaragaman hayati. Menurut data IUCN (Renstra Kementerian KLH 2015-2019), untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Untuk tumbuhan, 1 spesies punah, 2 spesies punah in situ, 115 spesies kritis, dan 72 spesies berstatus genting. Jadi sebagian spesies harus menghadapi ancaman kepunahan karena perusakan habitat dan perburuan untuk beberapa spesies tertentu akibat tingginya permintaan pasar.

2.2 Peluang

a. Infrastruktur dan Energi

Wilayah Republik Indonesia terbentang sangat luas dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote yang masih menyimpan banyak peluang sumber energi yang tidak terbarukan maupun yang tidak terbarukan (termasuk bahan bakar nabati) serta

sumber daya air yang tersebar di seluruh penjuru negeri, baik berupa mata air, sungai, danau dan lain-lain.

Di bidang infrastruktur jalan, masih tersedia lahan yang mencukupi untuk digunakan sebagai jalur penghubung antar daerah sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Sedangkan kawasan-kawasan terpencil banyak menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan bila tersedia bandar udara perintis.

Di bidang energi Indonesia memiliki PT Pertamina dan PT PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan usaha hingga ke manca negara. Kerjasama pemerintah dengan investor swasta dalam pembangunan jalan telah berjalan dengan baik dan dapat dikembangkan pula dalam hal pembangunan sarana perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat, serta juga untuk membangun bandara perintis.

b. Investasi

Indonesia memiliki beragam kegiatan perekonomian baik dalam produksi barang maupun jasa yang bisa menyediakan begitu banyak peluang bagi kegiatan investasi. Tiap provinsi, kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki kekhasan dan berpeluang untuk bisa memberikan keuntungan bagi berbagai kegiatan investasi.

Indonesia termasuk ke dalam 5 negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sehingga menciptakan peluang pasar yang luar biasa bagi beragam komoditas perekonomian yang dapat dimasuki oleh para investor.

c. Industri Pengolahan

Di ASEAN terdapat jaringan rantai produksi dalam industri otomotif dan elektronika. Jika Indonesia mampu menjadi bagian rantai nilai global pada kedua industri ini, maka Indonesia dapat meningkatkan atau setidaknya menstabilkan nilai ekspor, meningkatkan nilai tambah produksi, mengikuti perkembangan teknologi dan menggeser jenis industri andalan menuju padat modal dan padat teknologi.

Peluang untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis mineral, seperti nikel, bauksit, timah dan lainnya masih sangat terbuka. Indonesia memiliki kelimpahan bahan mineral tetapi belum memiliki industri pengolahan di hulu (peleburan dan pemurnian) maupun di hilir (produk konsumen).

d. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia di masa depan memiliki beberapa peluang: a) Budaya adalah komponen penting dalam kegiatan ekonomi kreatif. Kekayaan budaya Indonesia dan kekhasannya dapat menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi kreatif; b) Adanya kemampuan dan keterampilan artistik yang bersifat innate yang sulit dipelajari/ditiru, semisal keterampilan dalam seni ukir, lukis dan tari; c) Indonesia telah cukup sigap menangkap peluang ekonomi kreatif dengan menyiapkan kelembagaan pemerintah pendukung sejak 2011. Pada 2011, tiga direktorat jenderal baru dibentuk dalam Kementerian Pariwisata untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pada tahun 2015

kelembagaan ini diperkuat dengan terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif; d) Indonesia berpeluang untuk memimpin kerja sama internasional dalam bidang ekonomi kreatif. Pada November 2018 mendatang Indonesia akan menjadi tuan rumah World Conference for Creative Economy, dimana Indonesia dapat mengambil peran terhadap arah pengembangan kerja sama ekonomi kreatif lintas negara.

e. Pariwisata

Sektor Pariwisata berpeluang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Beberapa aspek yang mendasari terbukanya peluang tersebut adalah sebagai berikut: a) Dalam dua dasawarsa terakhir, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 2,93%, meskipun sempat mengalami guncangan krisis di tahun 2008-2009; b) Adanya Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 yang memberikan Bebas Visa Kunjungan kepada 169 Negara; c) Adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya; d) Pengembangan infrastruktur transportasi ke berbagai wilayah, terutama pelabuhan dan bandar udara.

f. Maritim dan Kelautan

Fakta bahwa dua pertiga wilayah Republik Indonesia berupa lautan telah menunjukkan peluang yang besar dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi

baik dalam bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Garis pantai Indonesia merupakan yang terpanjang kedua di dunia, sehingga memiliki begitu banyak sumber daya yang dapat menjadi peluang bagi pengembangan perekonomian wilayah pesisir.

Di bidang transportasi laut, fakta bahwa Indonesia memiliki belasan ribu pulau yang menjadi tempat tinggal penduduk lebih dari 250 juta jiwa menunjukkan peluang yang besar untuk kegiatan transportasi barang maupun penumpang.

g. Pangan

Pemanfaatan Lahan abadi pertanian dalam rangka ketahanan pangan perlu didukung dengan kebijakan peningkatan produksi pangan dengan teknologi pertanian. Selain itu, ketersediaan lahan di Jawa terbatas, sedangkan diluar Jawa lahan masih banyak yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah lahan-lahan non produktif. Aksesibiltas pembukaan lahan non produktif sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan, waduk dan irigasi. Penyediaan lahan pertanian baru dapat meningkatkan cadangan pangan dan menurunkan harga pangan.

Wilayah-wilayah lumbung pangan sudah terpetakan dengan baik, karena alam tropis Indonesia mendukung untuk tumbuhnya sumber-sumber pangan karbohidrat, protein nabati dan protein hewani.

h. Perdagangan

Di masa depan Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan perdagangan internasionalnya ke wilayah tujuan ekspor yang belum tergarap secara optimal. Amerika Selatan, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah dan Eropa Timur adalah wilayah-wilayah yang perekonomiannya akan tumbuh dan memiliki potensi untuk menjadi pasar bagi produk Indonesia.

Ekspor jasa memiliki peluang memanfaatkan kekayaan budaya, misalnya melalui pariwisata, musik dan film. Tumbuhnya sektor jasa juga seiring dengan perkembangan ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai tambah produk ekspor, diantaranya melalui desain produk, desain kemasan dan pemasaran.

Beberapa hal lain yang meningkatkan peluang ekspor adalah: Pasar domestik yang besar yang dapat menjadi basis bagi pengembangan produk ekspor; Cenderung menguatnya nilai tukar beberapa mata uang utama dunia terhadap Rupiah yang dapat memperkuat daya saing produk; dan berbagai perjanjian perdagangan bebas, terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dapat mempermudah akses produk Indonesia ke pasar luar negeri.

i. Lingkungan

Masih besarnya peluang meningkatkan nilai tambah hilirisasi pertambangan mineral karena cadangan mineral yang cukup besar dimiliki Indonesia.

Peluang pengembangan Bahan Bakar

Nabati/biodiesel, bioenergi untuk listrik atau pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Biomassa, Biogas, dan Sampah Kota, potensi tenaga air, potensi energi angin, potensi surya, potensi arus laut sebagai bagian dari bauran energi, sehingga Indonesia dapat melepaskan ketergantungannya terhadap energi fosil.

Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan lebih di perhatian dan menjadi pertimbangan teknis dalam pelaksanaan pembangunan. Para penggiat pro lingkungan semakin banyak dan aktifitasnya semakin mendorong masyarakat sadar akan pentingnya kelestarian alam dan lingkungan. Kolaborasi Pemerintah-LSM-Swasta dapat mendorong lebih cepatnya penerapan kebijakan pembangunan hijau / berkelanjutan.

Berkembangnya labotarium lingkungan daerah mendorong peranan iptek dalam meningkatkan indeks lingkungan hidup. Selain itu, peranan teknologi tepat guna dalam pengolahan limbah terus meningkat seiring kesadaran masyarakat dan swasta bahwa limbah/sampah masih ada nilai tambah bila diolah dengan tepat. Berkembangnya pendekatan penggunaan keanekaragaman hayati di Indonesia dalam penyediaan obat-obatan, menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya dengan tetap menjaga kesinambungan keanekaragaman hayati tersebut.

Progres penanggulangan perubahan iklim di

tingkat nasional sebagai bagian penting dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah cukup maju, seiring dengan perkembangan negosiasi ditingkat internasional.

2.3 Tantangan

a. Infrastruktur dan Energi

Ketersediaan lahan serta skema kerjasama yang ideal antara pihak pengembang swasta dengan pemerintah merupakan tantangan terbesar dalam penyediaan infrastruktur jalan dan pemukiman. Sedangkan tantangan utama dalam pembangunan bandar udara perintis selain pembiayaan pembangunan landasan bagi pesawat udara, adalah penyediaan pesawat perintis dan awaknya dalam melayani rute-rute penerbangan ke daerah terpencil.

Produksi berbagai bentuk sumber daya energi di Indonesia seringkali mengandalkan partisipasi dari investor asing sehingga belum menjadikan kita sebagai penentu utama dalam pembangunan bidang energi. PT Pertamina dan PT PLN seringkali menghadapi kendala arus kas dalam menjalankan *public service obligation* (PSO) sehingga belum dapat mengembangkan bisnis mereka secara optimal. Sementara pengembangan energi alternatif belum memiliki perencanaan yang optimal, termasuk dalam skema pelibatan pihak swasta. Masyarakat secara umum belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan energi secara hemat, sehingga memerlukan kegiatan penyadaran publik terus-menerus.

b. Investasi

Perkembangan perekonomian global yang sangat dinamis, sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para investor, terutama untuk PMA. Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif (termasuk masalah institusi terutama dalam menciptakan kepastian hukum dan pemberian insentif bagi investor) memerlukan kerja keras lintas sektor serta kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah.

Masih lemahnya daya saing nasional termasuk dalam produktivitas sumber daya manusia, merupakan tantangan penting yang kita hadapi. Tantangan lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum merata terutama kesenjangan antara kondisi di pulau Jawa dengan luar pulau Jawa, serta juga yang menghubungkan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dengan saran ekspor, pelabuhan, dll.

Sementara itu, terdapat pula tantangan untuk menyelaraskan antara mengundang investasi dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup (contoh: perkebunan kelapa sawit dengan kelestarian hutan, industri otomotis dengan pengendalian pencemaran udara). Tantangan berikutnya adalah kerjasama antara pemerintah-akademisi-dunia usaha secara luas untuk memantau implementasi atau penyempurnaan institusi di bidang investasi, termasuk dalam pembuatan paket-paket kebijakan untuk mengundang investasi.

c. Industri pengolahan

Pengembangan industri berorientasi ekspor dan jaringan rantai nilai global memerlukan investasi.

Karena itu diperlukan iklim investasi yang kondusif, mencakup kemudahan berusaha dan dukungan infrastruktur.

Untuk pengembangan industri otomotif dan elektronika, belum ada kesiapan alih teknologi yang maksimal mengingat kebanyakan pekerja Indonesia merupakan lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Pada industri pengolaha mineral, mengingat nilai investasi awal yang bernilai besar, kebanyakan investasinya memiliki orientasi jangka panjang. Untuk itu, diperlukan strategi nasional jangka panjang dengan kebijakan yang tidak mudah berubah mengikuti rezim poitik.

d. Ekonomi Kreatif

Di samping besarnya peluang baik di pasar domestik maupun luar negeri, pengembangan ekonomi kreatif juga memiliki tantangan sebagai berikut: a) Akses, pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia; b) Meningkatnya kemudahan akses informasi, lemahnya perlindungan hak cipta serta mahalnya biaya perlindungan hak cipta dapat menghambat proses kreatif, terutama yang bersifat penciptaan karya. Pelaku ekonomi kreatif cenderung memilih kegiatan meniru atau memodifikasi karya; c) Belum jelasnya batasan dan pengukuran kegiatan ekonomi kreatif yang digunakan secara sinkron pada tingkat pusat dan daerah. Sebagai akibatnya, tidak terdapat data ekonomi kreatif yang akurat dan dapat

diperbandingkan di tingkat daerah; d) Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya ekonomi kreatif di tingkat pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya pelibatan ekonomi kreatif dalam perencanaan pembangunan daerah.

e. Pariwisata

Meskipun memiliki peluang ekonomi yang besar, pengembangan pariwisata Indonesia juga memiliki beberapa tantangan berikut: a) Penjaminan pelestarian destinasi wisata, terutama destinasi wisata alam; b) Pengembangan destinasi wisata di luar Bali; c) Persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain, terutama di kawasan Asia-Pasifik.

f. Maritim dan Kelautan

Perikanan tangkap menghadapi tantangan adanya penangkapan berlebihan serta *overfishing* dan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Sementara budidaya perikanan menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan distribusi benih unggul, fasilitas kolam dan air yang baik, bahan baku pakan, serta kestabilan harga. Pelaku usaha perikanan tangkap maupun budidaya sebagian besar berskala kecil/tradisional sehingga menghadapi kendala permodalan, teknologi dan pasar. Sementara itu, pengembangan transportasi laut menghadapi tantangan dalam kuantitas dan kualitas pelabuhan laut serta peningkatan kuantitas dan kualitas jasa transportasi laut baik untuk penumpang maupun barang.

g. Pangan

Penegakan hukum masih lemah dan tidak tepat sasaran sehingga aturan kewajiban pembukan lahan baru akibat konversi lahan tidak berjalan dengan baik. Perlu terobosan yang dapat memberikan sanksi yang lebih tegas. Masih rendahnya nilai manfaat lahan pertanian mendorong beralihnya kepemilikan lahan.

Stabilnya harga pangan menjadi acuan berhasilnya mengontrol harga pangan. Untuk itu, perlu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog dan BI dalam mengontrol harga pangan. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan diversifikasi pangan adalah: (1) Daya beli masyarakat yang rendah; (2) Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat; (3) Teknologi pengolahan pangan lokal belum banyak berkembang; (4) Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang; (5) Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah; (6) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat; (7) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan

lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan (8) Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Karena sudah terpetakan dengan baik lumbung pangan nasional, diharapkan mulai memanfaatkan dengan lahan-lahan kosong non produktif. Karena kondisi alam Indonesia, maka ada beberapa produk pangan memang cocok untuk ilklim torpis di wilayah-wilayah tertentu. Tantangannya adalah membawa barang/produk segar pangan sampai ke lokasi konsumen.

h. Perdagangan

Meskipun terbuka peluang yang besar untuk peningkatan ekspor Indonesia di masa depan, tetapi terdapat pula beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian: a) Biaya logistik yang tinggi; b) Belum meratanya fasilitas produksi dan pelabuhan untuk kepentingan ekspor; c) Kecenderungan negara tujuan menggunakan hambatan non-tarif semisal melalui standar keamanan, kesehatan dan isu lingkungan; d) Masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong dan barang modal impor; e) Terms of trade Nonmigas yang menurun, yaitu menurunnya harga rata-rata produk ekspor Nonmigas yang diiringi dengan naiknya harga rata-rata impor.

i. Lingkungan

Masih terbatasnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Masalah penambangan liar dalam

bentuk pertambangan tanpa izin (PETI). Pada umumnya, kegiatan PETI ini dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar penambangan besar berijin, serta masyarakat pada daerah yang memiliki potensi pertambangan di tengah hutan yang tidak berdekatan dengan penambangan besar berijin.

Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti misalnya kenaikan muka air laut, kekeringan yang berkepanjangan, cuaca ekstrim yang berakibat banjir, longsor, dsb. Kondisi rentan ini pada akhirnya dapat mengganggu dan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi, pangan dan energi di dalam negeri. Target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% pada tahun 2020 (Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 berupa pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya melalui peningkatan pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta menahan laju deforestasi. Komitmen pra-2020 tersebut, kemudian diperbaharui menjadi 29% pada tahun 2030 (sesuai Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Indonesia yang disubmit sebelum COP-21 Paris).

Tantangan selanjutnya adalah isu/stigma negatif dari dunia internasional bahwa negara Indonesia merupakan penghasil emisi yang cukup besar. Stigma

negatif ini harus dibuktikan salah dengan melakukan program-program pembangunan yang ramah lingkungan dan penegakan hukum. Karena itu, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus didukung bukan hanya dari pemerintah, tapi dari kalangan swasta dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, koordinasi yang insentif dari berbagai sektor pemerintahan baik vertikal maupun horisontal (antar K/L) diperlukan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup selayaknya dipadankan dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini penting agar ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup terjamin dengan memperlakukannya secara bijak dan arif berlandaskan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.

Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan.

2.4 Arah Kebijakan

a. Infrastruktur dan Energi

Kebijakan di bidang infrastruktur harus diarahkan fungsi dasarnya yaitu memberikan pelayanan publik yang kian berkualitas. Infrastruktur yang berhubungan

dengan pengelolaan air harus mampu memberikan jasa air yang semakin berkualitas bagi rumah tangga, infrastruktur jalan harus memadai dari segi ketersediaan dan kualitasnya, infrastruktur perumahan yang harus semakin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan Infrastruktur bandara perintis menjadi penghubung daerah-daerah terpencil dengan pusat-pusat kegiatan perekonomian yang terdekat.

Kebijakan infrastruktur harus diarahkan agar mampu menunjang kegiatan investasi.

Kebijakan energi haruslah diarahkan sesuai dengan Pasal 2 UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, yaitu: “Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Harus dikembangkan sarana transportasi massal dan juga kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas . Harus pula dipersiapkan SPBG yang semakin meluas ketersediaannya. Sementara itu penggunaan gas untuk memasak harus diarahkan untuk menurunkan harga produk ini dan pengembangan jaringan gas di perkotaan menjadi arah penting yang harus dituju.

Sementara itu, produksi batubara harus diarahkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk produksi listrik, bahan bakar pabrik semen, pupuk, pulp serta untuk industri

metalurgi dalam negeri. Sedangkan pengembangan energi alternatif harus diarahkan pula ke bahan bakar nabati karena Indonesia memiliki potensi yang besar dalam produksi beragam komoditas pertanian.

b. Investasi

Kebijakan investasi harus diarahkan pada kehadiran PMDN dan PMA karena kedua bentuk investasi ini cenderung bersifat jangka panjang, aktivitasnya berupa pendirian usaha di sektor riil serta menyerap relatif banyak tenaga kerja. Bahkan dimungkinkan juga adanya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari keduanya.

Kebijakan investasi, baik PMDN maupun PMA, harus diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan perekonomian Indonesia yaitu: sebanyak mungkin melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi yang merupakan sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terutama di luar pulau Jawa serta mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi nasional

c. Industri pengolahan

Dari sisi produksi diperlukan insentif untuk investasi pada industri berorientasi ekspor dan jaringan rantai nilai global. Diperlukan pula insentif investasi pada industri pengolahan mineral dan turunannya. Insentif dapat bersifat langsung seperti keringanan pajak atau tidak langsung dalam bentuk kemudahan

berusaha dan perbaikan sistem logistik nasional.

Untuk memperluas dampak ekonomi dari industri pengolahan diperlukan kebijakan: a) mendorong pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan infrastruktur pendukung industri di luar Jawa; b) penyesuaian sistem dan kurikulum agar selalu tersedia tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri baik pada tingkat operasional maupun manajerial.

d. Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan ekonomi kreatif memerlukan arah kebijakan sebagai berikut: a) Penyertaan ekonomi kreatif dalam kurikulum Pendidikan; b) Penajaman definisi dan batasan serta pendataan yang berkala baik pada tingkat nasional maupun daerah; c) Peningkatan akses keuangan bagi pelaku ekonomi kreatif. Diperlukan komunikasi yang intens antara pelaku sektor keuangan dan pelaku ekonomi kreatif untuk mencapai kesepahaman pembiayaan pendirian usaha atau permodalan produksi. Akses keuangan dapat terhambat jika pelaku sektor keuangan kurang memahami karakteristik usaha ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif kurang memahami prosedur dan persyaratan lembaga keuangan.

Selain itu, ekonomi kreatif juga harus dapat memberikan dampak pemerataan kesejahteraan. Arah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: a) Pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi ke berbagai daerah di Indonesia. Berbagai kegiatan

ekonomi kreatif memerlukan dukungan teknologi komputer dan akses internet; b) Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada ekonomi kreatif, diantaranya dengan memasukkan ekonomi kreatif ke dalam perencanaan pembangunannya; c) Mendorong lembaga pendidikan di tingkat daerah untuk memasukkan materi ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan kreatif lokal ke dalam kurikulum pendidikannya; d) Melibatkan sebanyak-banyaknya komunitas lokal dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif, misalnya dalam pariwisata dan industri pengolahan, atau untuk memberikan nilai lebih kegiatan berskala nasional/internasional dalam bidang olahraga dan pertunjukan.

e. Pariwisata

Pertumbuhan pariwisata memerlukan arah kebijakan sebagai berikut: a) Penambahan destinasi wisata utama yang dapat menarik wisatawan mancanegara; b) Kemudahan investasi penunjang pariwisata; c) Penyadaran masyarakat akan pentingnya.

Selain itu, pariwisata juga harus dapat memberikan dampak pemerataan kesejahteraan. Arah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan wisata berbasis masyarakat/komunitas; a) Pada tingkatan minimal, masyarakat terlibat dalam perencanaan pengembangan suatu destinasi wisata. Masyarakat juga difasilitasi dalam persiapan usaha di destinasi

tersebut, meliputi usaha penginapan, restoran, penjualan cinderamata atau jasa perjalanan; b) Pada tingkatan yang lebih tinggi, aktivitas wisata yang ditawarkan bahkan dapat terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat.

Diperlukan penyadaran masyarakat akan: a) Pentingnya menjaga kelestarian obyek wisata; b) Pentingnya menjaga kepuasan wisatawan dan nama baik suatu wilayah. Hal ini penting agar wisatawan dapat kembali ke obyek wisata di masa mendatang atau setidaknya memberikan referensi positif kepada jaringannya.

Dari sisi infrastruktur, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata, meliputi transportasi dan komunikasi ke lokasi-lokasi wisata di daerah terpencil.

f. Maritim dan Kelautan

Perikanan terbukti telah menjadi potensi yang amat besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam jangka panjang kebijakan perikanan hendaknya lebih diarahkan ke bidang budidaya mengingat potensi yang besar serta kendala serta yang relatif lebih kecil dibanding perikanan tangkap. Peningkatan kesejahteraan para pembudi daya ikan harus terus diperhatikan agar mereka terus mau dan mampu mengembangkan usaha mereka menjadi semakin besar. Searah dengan kebijakan perikanan budidaya, kebijakan pengembangan kawasan pesisir harus diarahkan pada perluasan serta peningkatan

produktivitas kegiatan ekonomi di kawasan ini. Sedangkan arah pengembangan transportasi laut adalah pembangunan pelabuhan-pelabuhan laut yang bertaraf internasional dengan kemampuan melayani angkutan penumpang dan barang yang kian efisien. Secara khusus sepanjang koridor Sumatera-Jawa, transportasi laut harus menjadi alternatif yang dapat diandalkan dalam pengangkutan barang.

g. Pangan

Arah kebijakan dalam menahan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian harus mempertimbangkan : Nilai guna lahan dan asas kemanfaatan lahan dengan perencanaan dan pengendalian tata ruang, beralihnya wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan khususnya di pusat-pusat pertumbuhan, penguatan insentif dan disinsentif konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, proporsi lahan abadi pertanian, pemenuhan kecukupan pangan dan pengetatan regulasi. Untuk mengurangi tekanan konversi lahan di Jawa, maka perlu di dorong pembangunan industri di luar Jawa dengan syarat terpenuhi kebutuhan infrastruktur di luar Jawa. Untuk memenuhi kebutuhan dan cadangan pangan nasional, maka pembukaan lahan baru diarahkan di luar Jawa, khususnya lahan-lahan non produktif dan potensi lahan rawa terpadu.

Investasi sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, selain itu dengan investasi akan menambah jumlah tenaga kerja

di sektor pertanian. Investasi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing produk pertanian yang ditandai dengan alih teknologi (peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek) dan peningkatan kualitas SDM pertanian sehingga tercapainya industri pangan berkelanjutan dan memberikan insentif kepada industri pangan yang mendukung diversifikasi pangan dalam rangka mengurangi konsumsi karbonhidrat agar tumbuh dan dapat bersaing tingkat lokal, nasional dan internasional dengan tetap menjaga keamanan pangan. Keamanan pangan ditunjukkan dengan cara meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik yang mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan, penggunaan riset bibit unggul dan penurunan harga.

Pengendalian harga pangan diarahkan pada penguatan cadangan pangan dan distribusi pangan yang merata antar daerah. Sistem logistik pangan harus menjamin ketersediaan dalam memenuhi permintaan pasar, termasuk memperkuat sistem pergudangan/storage dengan menggunakan teknologi pangan sehingga dapat menjamin hilirisasi produk pangan lokal.

h. Perdagangan

Pertumbuhan ekspor memerlukan arah kebijakan sebagai berikut: a) Diversifikasi tujuan ekspor. Diperlukan upaya serius untuk menggarap wilayah tujuan potensial non-tradisional; b) Memanfaatkan

kedutaan besar dan kantor perwakilan negara sebagai market intelligence; c).

Memfasilitasi investasi, pembangunan atau pengembangan industri pengolahan yang mengolah komoditas ekspor lebih lanjut ke rantai yang lebih tinggi.

Selain itu, ekspor juga harus dapat memberikan dampak pemerataan kesejahteraan. Arah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: a) Percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di berbagai provinsi; b) Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung ekspor, meliputi pelabuhan, jalan, listrik dan telekomunikasi di berbagai provinsi; c) Perluasan akses permodalan ekspor, asuransi ekspor dan penjaminan ekspor bagi usaha kecil dan menengah; d) Penguatan rantai nilai global agar usaha kecil dan menengah dapat ikut menikmati manfaat perdagangan bebas melalui ekspor tidak langsung.

i. Lingkungan

Efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumberdaya alam, menjadi acuan bagi pengembangan industri yang berbasis sumberdaya alam, dan tetap menekankan pada pemeliharaan sumberdaya alam yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kegiatan pengolahan dan pemurnian atau smelter sumber daya mineral harus didorong untuk meningkatkan nilai

tambah perekonomian dengan memberikan insentif yang saling menguntungkan. Disamping itu juga diarahkan untuk membangun keberlanjutan bagi seluruh bidang dan tidak lagi berlandaskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata-mata, tetapi juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. Karena itu, perlunya penegakan standar pemanfaatan sumber daya alam khususnya pertambangan (good mining practice). Perhatian khusus ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumberdaya alam yang berlokasi di daerahnya. Karena itu, perlu pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan tentunya peningkatan hasil pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilakukan melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumberdaya alam termasuk bagi pemerintah daerah.

Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan yang terutama digunakan untuk mendukung industrialisasi dan infrastruktur harus ditingkatkan efisiensi dan daya saingnya, guna menurunkan tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat pulih, dan mengurangi ketergantungan pada sumberdaya alam

lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah.

Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan

sehari-hari. Selain itu kepentingan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional dari intervensi asing harus dijadikan pijakan dalam pengambil keputusan dalam diplomasi internasional.

LAMPIRAN

Notulensi 8 Mei 2018 Hotel Grand Savero Bogor

Sekarang sudah ada kerjasama antara Sekretariat MPR dan LPEM dengan ekspektasi laporan akan disampaikan pada akhir Juni sesuai dengan kebutuhan. Awal Juli target selesai untuk bahan kajian dan bulan Agustus akan disampaikan di sidang tahunan. Tapi di dalam penyusunan GBHN sendiri, prosesnya sekarang juga sedang berjalan sehingga dibutuhkan sinergi antara LPEM dan MPR untuk penyusunan GBHN ini. Di antara hal yang dicatat, termasuk cakupan isu-isu yang akan dimasukkan ke dalam GBHN. Akan dibahas lagi sebagai bahan akademia.Di dalam kerangka sistematika haluan negara itu, masih ada alternatif penamaan untuk garis-garis besar haluan negara sendiri dan nanti akan diputuskan bersama. Bappenas berharap adanya Haluan Negara untuk menjadi dasar politis untuk mendukung keputusan kebijakan. Beban di MPR itu jangan sampai haluan negara yang disusun mengganggu sistem. Sebisa mungkin Haluan Negara. Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi adalah yang sedang berjalan. Perlu ada sinergi antara hal yang dipersiapkan oleh alat kelengkapan dan tim penyusun konsep kajian. Di dalam kerangka sistematika Haluan Negara Pembahasan Terakhir. Untuk Sistematika, kurang lebih seperti ini.Tapi untuk sistematikanya sendiri sudah mengerucut dengan fokus outline Bab 1, Bab II, Bab 3 Bab IV Kondisi Umum, dan Bab V Arah Kebijakan dan Bab VI Arah Pembangunan. Tiga bab itu termasuk dari pembidangan. Untuk pembidangan terkait dengan kompilasi kegiatan-kegiatan MPR, untuk kondisi umum, arah kebijakan, tantangan terkait dengan muatan-muatan yang ditargetkan. Stok awal terkait dengan pendapat-pendapat GBHN terangkum di dalam materi yang dibagikan kepada semua dan diharapkan bisa menjadi bahan diskusi untuk masukan-masukan lebih lanjut. Konsep haluan negara, bagaimana

kondisi saat ini dan bagaimana sasaran dan arah kebijakan untuk tahun 2045. Secara informal sudah ada pembicaraan tentang ini dan sudah ada draft kasar tapi belum untuk formalnya sehingga belum ada data dan belum tentu up-to-date. Kondisi saat ini dan peluang serta arah kebijakan perlu dibicarakan. Sekarang membicarakan untuk kondisi umum yang sudah ada terlebih dahulu dan memperbaiki yang sudah ada. Hari ini hingga besok ingin menemukan kajian disini. Untuk bidang ekonomi, pengertian masih terbatas. Target untuk hari ini dan besok adalah kondisi umum bidang ekonomi.

PEMBAHASAN BIDANG EKONOMI

Dalam bayangan Bapak Surjadi, sub-bidang ingin lebih diteliti. Pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemerataan di dalam sistematika disebut sebagai sub-bidang. Semua ini termasuk dalam setiap bidang yang ingin dibahas. Pertumbuhan ekonomi bukanlah bidang tapi lebih merupakan fenomena yang bisa termasuk dalam semua bidang ekonomi ini jadi perlu didesain bersama sub-bidangnya. Sehingga perlu dipisahkan antara kebijakan bidang dan arah kebijakan secara umum. Awalnya dipisah dan tiap pembahasan itu ada, dan disederhanakan. Jadi ada kemungkinan tercampur di draft ini dan mungkin perlu dipisah sesuai dengan masukan. Sektor-sektor memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pemerataan.

Di awal dipisah tapi sekarang disederhanakan menjadi 4 bidang. Bidang ideologi, hukum, ilmu politik, ketahanan dan perdagangan. Di sub bidang lainnya bisa membicarakan tentang sektor-sektor.Pembidangan tidak terlihat mutually exclusive, misalnya pariwisata juga butuh investasi. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan lainnya lebih tepat jadi arah. Misalnya, pariwisata, jika ingin dijadikan alat untuk pertumbuhan ekonomi maka harus seperti apa, kalau untuk jadi lokomotif pemerataan seperti apa. Apabila diadu untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan seperti apa nanti bentuknya. Antara fenomena dan bidang sementara ini tercampur. Untuk ruang lingkup bidang ekonomi apa saja dan bisa merupakan sektoral seperti infrastruktur, agraria, ekonomi kreatif dan sebagainya tapi itu adalah hal-hal yang tercakup dalam pembangunan ekonomi tapi dalam setiap bidang tersebut, seperti industri, akan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan kalau bisa sustainable juga. Sehingga fungsi-fungsi ini

bisa dibatasi dalam bidang-bidang yang ada. Fenomena ekonomi itu cakupannya bisa tercatat dan setiap bidangnya bisa melaksanakan fungsi-fungsi berdasarkan fenomena ekonomi. Misalnya untuk menciptakan dasar struktur ekonomi yang tangguh sehingga dapat mencakup semua fungsi itu. Fungsi untuk setiap bidang ekonomi itulah yang harus ditentukan. Setiap bidang harus dievaluasi berdasarkan ketimpangan antara fungsi dan kondisi terkini, contohnya apakah akan ada bidang industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi tapi dengan ketimpangannya yang lebih besar—ini bisa menjadi indikator terjadinya salah arah dari kebijakan yang ada.

Untuk pengelompokan pertama dari pertumbuhan ekonomi sampai pemerataan pertumbuhan daerah harus dimasukkan di kondisi saat ini dan gambarannya seperti apa dan tingkat yang diharapkan di tahun 2045 itu seperti apa supaya terhindar dari *middle income trap* tapi dalam batas yang rasional yang bisa dicapai oleh Indonesia. Jangan membuat sulit presidennya dengan tujuan yang tidak mungkin dicapai. Mungkin harus dinyatakan bahwa bidang ekonomi itu mencakup apa dan tujuannya untuk apa. Bidang ekonomi itu akan mencakup fungsi dan tujuan dari pembangunan bidang ekonomi kemudian ada ruang lingkup atau cakupan bidang. Penggambaran itu kondisinya seperti apa. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan poin tersendiri yang juga perlu dimasukkan. Semua pembangunan harus mencakup pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga semua sektor harus mencapai pembangunan berkelanjutan.

Banyak bidang tapi sebenarnya yang perlu diperkuat adalah struktur ekonomi nasional. Strukturnya itu akan menjawab yang mana yang perlu diperkuat. Kondisi umum dari yang dituju dari kondisi ekonomi mungkin dapat dimasukkan sehingga arah kebijakan dapat dituliskan target yang perlu dicapai di tahun 2045 dengan mengacu ke kondisi umum di tahun yang ada. Struktur ekonomi yang perlu

diperkuat—di mana struktur ekonomi sudah dipikirkan—transformasi struktural untuk 2045 sudah harus dipikirkan untuk menentukan arah dari komposisi ekonomi Indonesia dan apa tujuan asalnya. Struktur perekonomian bisa dibayangkan perubahan yang penting dilakukan untuk setiap sektornya.

Batasan panjang satu dokumen yang wajar tidak ada tapi semua gagasan mendasar perlu masuk tapi tidak teknis. Ada kondisi umum setiap bidang karena semua bidang akan mengarah ke satu kondisi umum perekonomian. Kondisi umum ini akan dibangun dari performance dari masing-masing bidang sehingga nanti ada kondisi umum perekonomian, nasional dan bidang-bidan ekonomi. Misalnya bidang pangan dan energi akan dibahas pencapaiannya seperti apa sehingga tantangannya seperti apa terlihat dengan lebih baik. Sehingga akan ada arah negara dulu seperti ekonomi terbesar berapa di dunia dan nanti per sektor pencapaiannya apa.

Sementara ini untuk bidang perdagangan, pertumbuhan ekspor barang terdapat fluktuasi walaupun ekspor jasa secara umum masih stabil walaupun kecil. Sektor non-migas sudah ditinggalkan jauh dari yang migas. Dari sisi komposisi, terlihat bahwa Indonesia untuk non-migas masih mengandalkan pertambangan dan untuk industri pengolahan masih mengandalkan komoditas perkebunan kelapa sawit dan karet yang masih menggunakan pengolahan sederhana. Tujuannya 50% perdagangan hanya ke 5 negara saja. Ekspor yang berasal dari provinsi. Ada juga kemungkinan bahwa untuk mengekspor, pelaku perdagangan harus mengirim barangnya ke pelabuhan tertentu yang mengakomodasi ekspor. Peluangnya termasuk dari wilayah tujuan ekspor yang belum tercakup dalam prioritas Indonesia, kesempatan untuk ekspor jasa yang lebih besar, efisiensi produksi industri dalam negeri dan *competitiveness* dari *exchange rate* mata uang Indonesia. Tantangan untuk Indonesia seperti belum terpenuhinya fasilitas untuk

ekspor seperti transportasi antara untuk menuju pelabuhan ekspor dari tempat produksi, lalu ada hambatan non-tarif dengan standar lingkungan dan kesehatan yang bisa menjadi penghalang untuk Indonesia dalam memajukan ekspor. Sedangkan impor barang kita sebenarnya lebih besar dari barang mentah yang akan diolah menjadi barang ekspor. Sedangkan untuk komoditas non-migas, terdapat penurunan ekspor. Dalam arah pertumbuhan untuk ekspor, salah satunya adalah diversifikasi tujuan ekspor, pemanfaatan diplomat untuk menjadi agen perdagangan nasional yang memberikan informasi, pemerataan pendapatan dari percepatan pertumbuhan di daerah luar Jawa yang berhubungan dengan ekspor, masuknya UKM untuk ikut terlibat dalam perdagangan internasional. Sustainability dibutuhkan karena bisa mendukung melewati non-tarrif barrier. Indonesia secara umum lebih bersifat menunggu dan tidak mau membuka jalan. Kelapa sawit dikalahkan Minyak Bunga matahari di luar negeri karena dianggap lebih ramah lingkungan. Kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia harus mau untuk membuka jalan. Di Moscow ada pameran dagang Indonesia dan peminatnya banyak. Mereka sudah membuka diri tapi tidak ditanggapi pebisnis Indonesia. Seperti untuk produk bakso, mangga dan durian yang laku di pameran tersebut. Di Indonesia, penduduknya cenderung membutuhkan uang cepat sehingga banyak yang lebih memilih menjual benih lobster misalnya dibandingkan produk lobster dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kalah saing karena sudah terlanjur dijual benihnya saja dan yang mendapatkan nilai tambah tertinggi adalah mereka yang menjual lobster dewasa.

Sementara ini hasil dari tim LPEM, gambaran besar belum terangkum. Tiap sektor harus mendukung tujuan GBHN seperti pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan sebagainya. Diharapkan akan ada perkiraan indeks Gini turun sampai di mana.

Rangkuman makroekonomi juga belum ada sehingga nanti bisa ditambahkan. Semangat pemerataan dan inklusivitas harus lebih menonjol sehingga inklusi lebih diperhatikan. Kondisi umum perekonomian nasional belum ada. Kalau di dalam konteks pemerataan antar daerah, konvergensi diperlukan sebagai satu isu penting sehingga terjadi kesetaraan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Hitungannya dengan intervensi pembangunan massive perlu dikonsiderasi selama 45 tahun pada tingkat yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dengan Indonesia Barat. Sektor ekonomi--9 sektor—perlu dikonsiderasi tapi mungkin pemakaian bidang dalam konteks ini lebih tepat karena dalam Visi 2045 Bappenas memakai bidang juga. Sektor lebih merupakan kumpulan produksi ekonomi. Penggunaan GNP bisa dikonsiderasikan untuk menggantikan GDP. GNP bisa membedakan antara wilayah dan warga negara dan kalau untuk pemarkiran uang tidak di sini. Tax amnesty sudah membuat dana-dana di luar negeri ditarik ke dalam negeri. Untuk per bidang sudah cukup tapi seberapa dalam dibutuhkannya perlu ditentukan. Seperti untuk bidang energi Minyak Bumi, Batu Bara, Gas dan Bahan Bakar Nabati dan Infrastruktur—Jalan, Waduk, Bandara Perintis—batasan masih belum jelas. Tapi dimohon untuk jangan sampai terjebak pada sisi teknokratis—jadi diharapkan hasilnya masih umum saja tapi bersifat strategis. Jangan sampai hasil proyek ini sama dengan RJPJ yang lebih bersifat teknokratis. Untuk kondisi umum energi bisa dimasukkan tapi perlu diperhatikan juga target *energy mix*-nya agar arah komposisi energinya dapat ditentukan. Arah untuk bergerak ke EBT harus dibuka. Energi nabati baru kompetitif jika harga minyak mental USD 100/barrel. Jika dilihat dari harga, tenaga listrik dari air seperti PLTA, Mikrohidro bisa menjadi pilihan paling murah, lalu juga ada energi Panas Bumi sebagai potensi energi baru terbarukan yang besar walaupun sunk cost yang muncul akan besar untuk panas bumi. Terdapat juga ide untuk memakai

mata uang yang lebih menguntungkan dalam pembelian energi (minyak mentah) dari luar negeri—seperti Yuan Cina namun karena pergeseran nilai tukar tidak dapat ditebak apabila mengunci jenis mata uang yang perlu dipakai akan berarti mengurangi fleksibilitas dalam transaksi dan dapat merugikan. Untuk isu cadangan penyangga energi, undang-undang sudah ada dan ini akan memperkuat ketahanan energi—mungkin hal ini perlu diberikan payung hukum karena di negara-negara maju ada peraturan untuk anggaran mengenai ini, sekarang kita hanya mengandalkan Pertamina yang hanya akan bertahan 22 hari dan hal ini sangat rawan. Sedangkan minyak mentah memerlukan proses lebih lanjut sedangkan jika ada perang atau bencana alam dalam skala masif, hal ini tidak akan cukup menopang Indonesia untuk bertahan. Di bagian energi, ketahanan energi perlu disinggung dengan jelas cadangan penyangga energi. Bappenas lebih ke ketahanan dan MPR lebih ke kedaulatan. Di New Zealand, ada gudang besar yang digunakan untuk menyimpan hasil panen yang dimiliki koperasi—petaninya tidak langsung mendapat uang—jumlah barang dan juga kualitas dicatat saja tapi akan mendapat jaminan bahwa akan menerima uang begitu hasil panen itu disalurkan ke pasar. Gudang pangan raksasa itu diperlukan untuk masalah pangan dan sangat berpengaruh untuk kedaulatan pangan itu—stok akan lebih stabil dan harga tidak berfluktuasi tajam. Suhunya di gudang itu 4 derajat dan tidak mengaktifkan bakteri sehingga tidak akan membusuk dengan suhu tersebut. Untuk level daerah seperti Bekasi—programnya lebih ditujukan untuk menyiapkan dana untuk pembelian tambahan beras dari Jakarta dibandingkan untuk menyiapkan daerahnya untuk persediaan. Pengelolaan sumber daya air bisa dilihat dari sisi sumber daya alam dan pemerataan. Pemerataan bisa dibahas untuk distribusi. Gambaran untuk pemerataan harus terlihat dari distribusi dan lokasi seperti konsentrasi pencapaian air bersihnya di mana. Pembangunan waduk misalnya dibuat dimana.

Pertumbuhan bisa dilihat tanpa harus menceritakan ketimpangan. KLH sudah ada di provinsi untuk lingkungan hidup dan air. Kondisi umum harus tergambar antar wilayah dan dapat terlihat gambaran tanpa terlalu bersifat teknokratis.

Ada Tap MPR yang masih berlaku tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. 4 ini dianggap sebagai haluan negara. Dari konteks sumber daya—tanah itu termasuk sumber daya alam. Bumi, air, ruang angkasa tertera di Tap MPR No. IX 2001 bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.Diharapkan tidak usah disebut secara eksplisit tapi sudah bisa diidentifikasi secara implisit. Semua negara memiliki perencanaan jangka panjang. Backbone industri dan berorientasi ekspor. Malaysia sebelumnya berorientasi pada ekspor makanan minuman lalu sekarang diubah dan ditargetkan pada 2020 telah menjadi negara maju dengan orientasi teknologi dan orientasi otomotif. Pembedaan Australia adalah *institutional extract*. Dokumen jangka panjang—Indonesia butuh *grand design* yang jelas. Konsisten, persisten dan terus menerus. Peraturan peraturan pendukung dibutuhkan. Kawasan ekonomi khusus bisa meningkatkan tingkat investasi di daerah tersebut. Tapi untuk infrastruktur yang ada apakah masih bersifat menghubungkan orang dibandingkan menghubungkan dengan kawasan industri atau ekonomi khusus.

Investasi portofolio akan terpengaruh oleh sektor riil. Saham-saham yang berorientasi dalam negeri itu rendah. Kalau pemilik saham dari luar negeri mempertahankan sahamnya sebagai 3 atau 6 bulan maka itu FDI karena sudah ada proses dari transaksi sektor. Amerika dan Inggris kuat karena sektor riilnya kuat. Outflow untuk investasi terjadi kalau investasi lebih murah dibandingkan di dalam negeri. 90% eksportir adalah importir. *Hollow middle—all materials are not existing in Indonesia*. Industri membutuhkan lahan dan lahan permasalahannya

dengan infrastruktur. Arsyad Anwar menemukan bahwa Jawa masih menjadi fokus pembangunan industri nasional padahal Jawa adalah tempat yang paling subur. Pertanian seharusnya digunakan di Jawa. Sedangkan di Kalimantan membutuhkan perlakuan khusus untuk tanah tersebut karena kurang subur. Di Jawa menjadi petani sulit untuk regenerasi sehingga pembangunan industri masih menjadi tujuan pekerjaan. Jawa menjadi fokus karena untuk menjadi industri membutukan infrastructure tapi untuk *free flows of goods*. Sehingga penduduk tidak akan terkonsentrasi di Jawa tapi lebih tersebar ke kota-kota lain. Ripah gemah tanaman pangan di Jawa seharusnya. Mendekatkan industri ke daerah Kalimantan atau Sulawesi lebih masuk akal karena raw materials lebih banyak di sana. Jawa kalau dijadikan lumbung padi lebih sangat mungkin menjadi pesaing yang lebih baik dari Thailand. 2045 populasi vs. teknologi. Untuk masalah logistik—instruksi untuk gudang pangan dari Pak Presiden setelah berkunjung ke Timur Tengah. Untuk gudang, Indonesia, Malaysia, dan Thailand memproduksi 70% karet. Belgia salah satu eksportir terbesar untuk karet. Storage yang mampu menyimpan karet sehingga kadar air tidak naik. Karet begitu disadap langsung dijual murah. Storage mahal. Gudang dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas. Gudang karet bisa dibangun di Kalimantan. *Supply chain—needs to be checked*.

Lahan produktif diharapkan tidak dikonversi untuk industri. Teknologi pertanian perlu dimasukkan dalam perencanaan. Riset tentang teknologi pangan sudah mulai dikembangkan. Sudah ada bibit unggul dengan hasil 12 ton per hektar. Ketahanan pangan ada protein yang ada kaitannya dengan sektor peternakan—daging ayam, daging sapi dan telur. Susu dan ikan juga perlu dimasukan ke dalam konsiderasi. Tantangan dan peluang perlu dipetakan dengan baik. Lahan, protein dan pertanian dicakup dalam bidang ini. Menyinggung masalah keamanan pangan—*food security*. Kesehatan. Distribusi ikan

untuk logistik ikan. Gudang lumbung pangan harus dilindungi. 2045 *food waste*—banyak faktor. Waste bisa dari konsumen, bisa untuk *delivery* dan *storage*.

EKONOMI

Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi ke dalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Selain itu kepentingan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional dari intervensi asing harus dijadikan pijakan dalam pengambil keputusan dalam diplomasi internasional.